

KAJIAN DAN EVALUASI KEGIATAN DAK FISIK/BOKB MENU LINLAP 2021-2023

Analisa Dampak pada
Pencapaian Kinerja
Bangga Kencana

hal.7

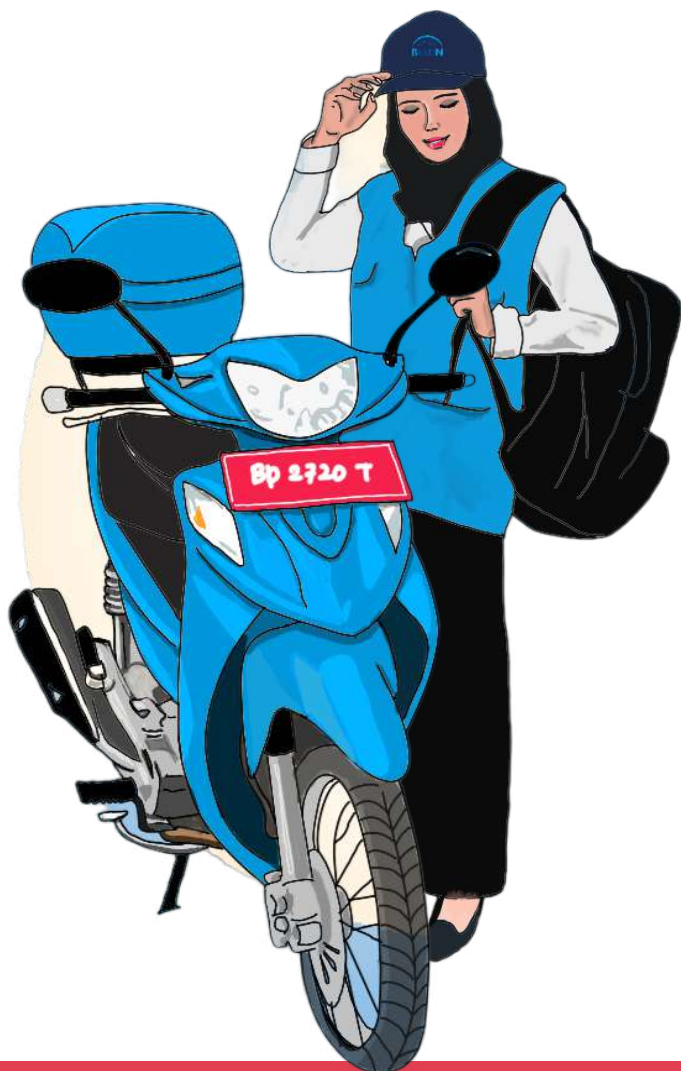
Isu Strategis DAK Fisik
dan BOKB Menu Lini Lapangan
tahun 2021-2023

hal.9

A. Latar Belakang

Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang dijalankan dalam bentuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang merupakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Salah satu fokus dari Program Bangga Kencana tersebut juga salah satunya adalah penurunan stunting, dimana sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN selaku Ketua Pelaksana perlu melakukan konvergensi program di berbagai level tingkatan wilayah sebagai upaya pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu menuju angka 14 persen pada Tahun 2014.

Untuk mendukung dan memastikan berbagai



kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan stunting tersebut dapat berjalan tentunya diperlukan dukungan pendanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan operasional di lapangan dapat terlaksana. Melalui Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada Daerah tertentu yaitu pendanaan DAK Sub Bidang KB DAK Fisik maupun Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diharapkan dapat membantu program kegiatan khusus dan kegiatan layanan kepada masyarakat secara langsung, untuk itu Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan, Kedepujian Bidang Advokasi, Penggerak dan Informasi akan melakukan kajian sekaligus monitoring dan evaluasi Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik Sub Bidang KB menu linlap tahun 2021-2023.

Adapun salah satu bentuk kegiatan operasional dan penganggaran dukungan BOKB tersebut dalam upaya implementasi Program Bangga Kencana dan operasional penurunan Stunting antara lain yaitu Kegiatan Operasional Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan KB dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Lini Lapangan. Anggaran ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Balai Penyuluhan KB, pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting dan peningkatan pengetahuan kader PPKBD dan Sub PPKBD. Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara selaras dan berkesinambungan dari mulai tingkat pusat sampai kepada kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan serta manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan keluarga.

B. Tujuan

Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

- Mendapatkan kajian dan evaluasi pelaksanaan menu lini lapangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam menganalisis pemanfaatan penggerak di lini lapangan.
- Adanya hasil evaluasi pelaksanaan yang akan dijadikan bahan dasar dalam penetapan kebijakan dukungan DAK sub bidang Keluarga Berencana selanjutnya.
- Sebagai bahan analisa terkait menu DAK Fisik dan BOKB lini lapangan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

C. Metode Pelaksanaan

Pengumpulan data informasi di dapatkan dari berbagai pihak pelaksana kegiatan terkait DAK Fisik dan BOKB Tahun Anggaran 2021-2023 yang dilakukan secara virtual, melalui metode paparan terhadap realisasi penggunaan anggaran dari berbagai kabupaten dan kota, kendala penyerapan anggaran dan berbagai hal terkait dengan tata kelola serta mekanisme pencairan Dana Alokasi Khusus di daerah.

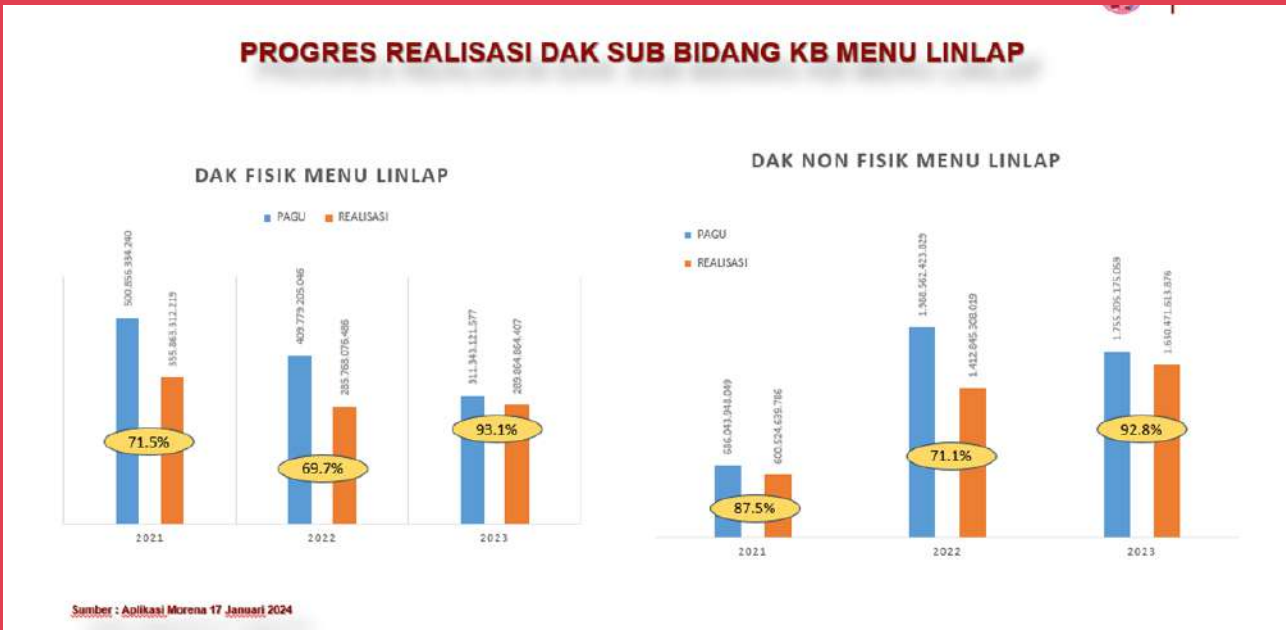
D. Hasil Kajian dan Evaluasi

I. Capaian dan Realisasi Anggaran DAK Fisik dan BOKB Menu Lini Lapangan 2021-2023

Untuk memaksimalkan peran Balai Penyuluhan KB, Kendaraan antar jemput akseptor dan penanganan Stunting perlu adanya dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di lini lapangan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan Stunting. Begitu utamanya peran Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan dan pengadaan kendaraan antar jemput akseptor, sehingga perlu adanya pengembangan Balai Penyuluhan KB di Tingkat kecamatan, pengadaan kendaraan antar jemput akseptor, dukungan ini diwujudkan melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB.

Pengembangan Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan tersebut sebagai Pusat Pengendali Manajemen Operasional Program Bangga Kencana di Lini Lapangan. Saat ini jumlah Balai Penyuluhan KB sebanyak 6.353 (86%) dari total 7.277 kecamatan di Indonesia, yang berarti masih diperlukan 924 Balai Penyuluhan KB. Salah satu dukungan operasional kegiatan di Balai Penyuluhan KB melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana merupakan belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik sehingga kegiatan program prioritas nasional dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi urusan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik dan terciptanya penduduk yang seimbang dan berkualitas. Serta dukungan dana dari DAK Fisik yakni dalam mendukung kelengkapan sarana dan prasarana di balai penyuluhan KB serta pengadaan kendaraan antar jemput akseptor. Dana DAK Fisik dan dana operasional BOKB telah digunakan beberapa tahun terakhir dan dianggap pendukung anggaran yang significant untuk sebagian kabupaten/kota dalam mendukung upaya percepatan program, Adapun trend penggunaan dana DAK sub Bidang KB dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:





Dari grafik diatas menunjukkan bahwa selalu ada peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2021-2023 dalam penyerapan anggaran sekitar 4-20%.

2. Perkembangan Unit Cost Anggaran DAK fisik dan BOKB menu lini lapangan tahun 2021-2023

Dukungan Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana digunakan untuk kegiatan-kegiatan secara langsung untuk penggerakan-penggerakan, pemberian layanan yang sifatnya promotif, edukatif dalam peningkatan SDM lini lapangan dan peningkatan pengetahuan yang memberikan dampak hasil pemanfaatan pemberian layanan langsung kepada masyarakat ataupun keluarga. Sedangkan dukungan bantuan DAK fisik digunakan dalam mendukung ketersediaan sarana dan prasarana di balai serta kebutuhan dalam melayani Pelayanan KB.

Pada tahun 2021 unit cost masih disusun berdasarkan Standar Biaya masukan masing-masing provinsi dan dihitung dalam paket pelayanan. Mulai Tahun 2022-2023, setiap menu sudah dihitung berdasarkan ketersediaan balai di provinsi berdasarkan jumlah kecamatan dimana 1 kecamatan terdapat 1 balai penyuluhan. Baik Balai Penyuluhan KB maupun Kendaraan antar Jemput Akseptor kebutuhannya masih belum memenuhi target. Unit cost BOKB sesuai dengan Harga Satuan Pokok yang dikeluarkan melalui peraturan Kepala BKKBN mengikuti SBM yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan. Total target BOKB mengalami perubahan disesuaikan

dengan daerah yang mendapat nilai dengan kapasitas fiscal sangat tinggi dan tinggi tidak dimasukkan dalam perhitungan target (menu daya dan jasa dan serta Keamanan dan Pramusaji) yang diharapkan agar bisa masuk dalam pembiayaan yang bersumber dari APBD.

Balai Penyuluhan KB yang dibangun di wilayah kecamatan difungsikan sebagai Pusat Pengendali Operasional Program Bangga Kencana serta Penurunan Stunting di Lini Lapangan, adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB antara lain:

1. Pengelolaan administrasi perkantoran seperti surat menyurat, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pencatatan dan pelaporan;
2. Penyusunan program penyuluhan;
3. Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi Bangga Kencana;
4. Pusat Penyuluhan Program Bangga Kencana di lini lapangan, Pelaksanaan pelayanan KB dan KS yang bersifat pelayanan tingkat dasar;
5. Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Lini Lapangan;
6. Pengembangan Program Pengembangan Balai Penyuluhan seperti sosialisasi melalui berbagai media, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial dan lomba antar Balai Penyuluhan.



Dana DAK Fisik dialokasikan untuk pengembangan Balai Penyuluhan KB, baik pembangunan/alih fungsi/rehab/pengadaan kelengkapan Balai Penyuluhan KB sehingga diharapkan disetiap kecamatan terdapat Balai Penyuluhan KB. Dana DAK fisik juga diperuntukan untuk Kendaraan Antar Jemput Akseptor yaitu kendaraan roda dua, roda empat dan kendaraan air. Kendaraan antar jemput akseptor sangat berguna bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat yang lokasinya sangat jauh dari tempat pelayanan KB. Kendaraan antar jemput akseptor juga digunakan untuk membantu para kader dalam melakukan pendampingan, fasilitasi pelayanan bansos sebagai upaya percepatan penurunan stunting.

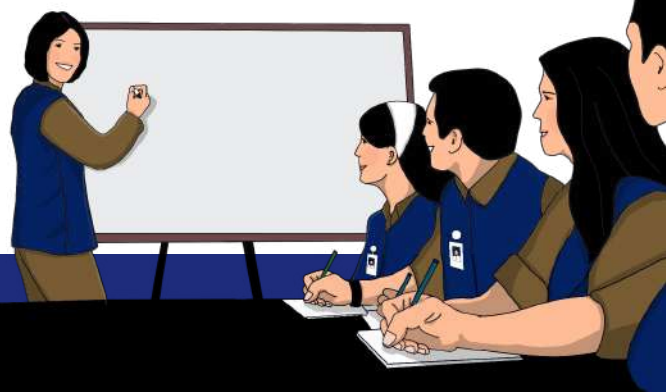
Pemanfaatan Balai Penyuluhan KB selama ini menjadi point strategis dalam menjalankan program yang ada di BKKBN dan tentunya dengan adanya dukungan dana DAK Fisik Sub Bidang KB, Pemanfaatan Balai Penyuluhan sebagai Pusat Pengendalian Program Bangsa Kencana di Kecamatan, diharapkan menjadi wadah yang tepat untuk menyelenggarakan pelayanan program Bangsa Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Adapun kegiatan yang dilakukan sampai penerima manfaat juga mengalami perubahan tanpa merubah esensi dari tujuan yang ingin dicapai yakni Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang Isu Kependudukan di wilayah binaan kader; Peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga akseptor tentang pentingnya pengelolaan keuangan keluarga; Peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan PPKS; Terlaksananya sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman kepada ibu hamil, keluarga yang mempunyai Baduta, anak dan keluarga lainnya tentang pentingnya pengasuhan sehingga anak tumbuh kembang dengan optimal; Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan balita dan anak; Meningkatnya Kualifikasi IMP dari Dasar menjadi Berkembang, Berkembang menjadi Mandiri; Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam melakukan KIE Program Bangsa Kencana. Pada Tahun 2021 hingga tahun 2023, pelaksanaan kegiatan di balai penyuluhan baik secara pembagunan DAK Fisik sampai pelaksanaan operasional sudah berjalan cukup baik. Menu Operasional Balai Penyuluhan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan di tahun 2023 dimana menu pembinaan dan orientasi menjadi satu menu dalam menu Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan. Biaya Operasional pendampingan dan survailance juga dirampingkan ke dalam menu pendampingan dan pemantauan tim KRS. Berikut adalah tabel menu setiap tahunnya dari tahun 2021-2023:

| NO | KEGIATAN | 2021 | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | PAGU | REALISASI |
| 1 | Biaya Operasional Penyuluhan KB | Rp211.149.085.436 | Rp179.285.544.918 |
| 2 | Biaya Operasional Pembinaan Kader | Rp56.958.285.410 | Rp47.459.684.217 |
| 3 | Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan | Rp48.863.543.436 | Rp40.196.704.699 |
| 4 | Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa | Rp35.900.950.076 | Rp18.235.621.752 |
| 5 | Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Oleh Kader Di Wilayah Kerjanya | Rp233.430.285.144 | Rp208.742.087.304 |
| 6 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan | Rp99.741.798.547 | Rp106.604.996.896 |
| TOTAL | | Rp686.043.948.049 | Rp600.524.639.786 |

Direktorat Bina Penggerakan di tahun 2021 menjadi pengampu untuk 6 (enam) sub menu operasional di balai penyuluhan. Adapun kegiatan yang dilakukan mencakup pertemuan, pembinaan dan penyuluhan di Balai Penyuluhan yang dapat diselenggarakan secara luring dan/atau daring. Hal yang sama juga masih dilakukan di tahun 2022 dimana pelaksanaan operasional pembinaan serta orientasi lapangan masih menjadi sub menu yang terpisah.

| NO | KEGIATAN | 2022 | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | PAGU | REALISASI |
| 1 | BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN KB | Rp93.374.383.713 | Rp85.137.078.766 |
| 2 | BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN KADER IMP | Rp25.875.600.556 | Rp23.688.850.349 |
| 3 | BIAYA ORIENTASI LINI LAPANGAN | Rp18.925.268.381 | Rp17.012.246.915 |
| 4 | BIAYA LANGGANAN DAYA DAN JASA | Rp16.324.167.897 | Rp9.813.761.056 |
| 5 | BIAYA OPERASIONAL JASA TENAGA KEAMANAN DAN PRAMUSAJI BALAI PENYULUHAN KB | Rp81.254.661.596 | Rp75.897.593.805 |
| 6 | BIAYA OPERASIONAL PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN DI DESA | Rp42.665.278.597 | Rp16.526.331.065 |
| 7 | BIAYA OPERASIONAL PENDAMPINGAN IBU HAMIL DI DESA | Rp390.026.926.494 | Rp140.279.913.976 |
| 8 | BIAYA OPERASIONAL PENDAMPINGAN PASCA PERSALINAN DI DESA | Rp106.357.973.894 | Rp54.119.684.640 |
| 9 | BIAYA OPERASIONAL SURVAILANCE STUNTING TINGKAT DESA (PAKET DATA UNTUK PELAPORAN) | Rp691.009.656.377 | Rp503.930.978.863 |
| 10 | BIAYA MINI LOKAKARYA KECAMATAN | Rp130.738.198.997 | Rp109.911.987.928 |
| 11 | BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN KIE OLEH KADER (PPKBD DAN SUB PPKBD) | Rp392.010.307.327 | Rp376.526.880.656 |
| TOTAL | | Rp1.988.562.423.829 | Rp1.412.845.308.019 |

| NO | KEGIATAN | 2023 | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | PAGU | REALISASI |
| 1 | Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan | Rp131.897.054.658 | Rp122.210.519.720 |
| 2 | Langganan Daya dan Jasa | Rp17.466.891.976 | Rp11.068.426.978 |
| 3 | Keamanan dan Pramusaji | Rp85.690.511.228 | Rp81.314.076.261 |
| 4 | Operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko dan Balita Stunting | Rp665.417.918.471 | Rp617.053.539.351 |
| 5 | Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran berisiko Stunting | Rp597.158.849.762 | Rp556.629.119.607 |
| 6 | Mini lokakarya Kecamatan | Rp96.500.775.266 | Rp87.215.941.800 |
| 7 | Operasional Pelaksanaan KIE | Rp161.073.173.698 | Rp154.979.990.159 |
| TOTAL | | Rp1.755.205.175.059 | Rp1.630.471.613.876 |



Dari ketiga tabel diatas, pelaksanaan dari tahun 2021-2023 meskipun terjadi peleburan kegiatan pembinaan dan orientasi, secara realisasi anggaran tetap meningkat di setiap tahunnya. Ini menunjukkan kebermanfaatan dana BOKB di balai penyuluhan memang sangat efektif membantu kegiatan operasional. Balai Penyuluhan KB dibangun tidak hanya sebagai kantor UPT KB melainkan mempunyai fungsi yang lebih komprehensif, yaitu sebagai Pusat Pengendalian Manajemen Operasional Program Bangsa Kencana di tingkat Lini

Lapangan. Kendaraan antar Jemput akseptor terutama kendaraan roda dua diperlukan untuk mendampingi para calon akseptor, sasaran KRS yang memerlukan pendampingan. Dengan adanya Balai Penyuluhan KB diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan dan semangat kerja para pengelola program KKBP (PPLKB/Ka UPTKB/Koordinator KB, PKB, PLKB, IMP, dan Mitra Kerja) sehingga dapat meningkatkan kinerja program Bangsa Kencana di Lini Lapangan. Begitu pentingnya kendaraan antar jemput akseptor yang bermanfaat langsung ke masyarakat perlu didukung untuk pengadaannya. Serapan DAK Fisik tahun 2021-2023, setiap provinsi juga dapat merealisasikan anggaran DAK Fisik dengan baik.

4. Analisa Dampak pada Pencapaian Kinerja Bangsa Kencana

Dari semua kegiatan dan capaian realisasi DAK Fisik dan BOKB yang telah dilakukan dari tahun 2021-2023 secara tidak langsung berdampak pada hasil capaian kinerja utama Program bangsa kencana yaitu:

- a. mUKP, Adapun capaian Mukp di tahun 2021-2023 meningkat berdasarkan pendataan keluarga adalah sebesar 20,7% di tahun 2021; 21,0 di tahun 2022; dan 22,3% di tahun 2023 yang artinya median Usia Kawin Pertama yakni 50% dari semua Wanita 15-49 tahun dengan status pernah kawin adalah diusia 20,7 tahun pada tahun 2021 dan meningkat 22,3 Tahun pada akhir tahun 2023.
- b. mCPR (Prevalensi Kontrasepsi Modern), sama halnya dengan median usia kawin pertama, prevalensi penggunaan kontrasepsi pada Wanita kawin umur 15-49 tahun juga mengalami trend peningkatan. Di tahun 2021 capaian mCPR sebesar 57%, tahun 2022 sebesar 59,4% dan terus meningkat di tahun 2023 yakni sebesar 60,4%. Hal ini menunjukkan 60 dari 100 Pasangan Usia Subur di Indonesia sudah menggunakan kontrasepsi modern. Gerakan penyuluhan di lapangan terkait Upaya dalam menggunakan kontrasepsi bisa dilihat mulai meningkat secara perlahan.
- c. PA MKJP (Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)), trend persentase PA MKJP sempat mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 namun meningkat Kembali di tahun 2023. Tahun 2023 persentase PA MKJP sebesar 23,64 yang artinya 24 dari 100 PUS di Indonesia menggunakan kontrasespsi modern.



d. Capaian Unmet Need masih menjadi pekerjaan rumah terbesar, dimana Masih belum tercapainya target penurunan unmet need dimana unmet need Tahun 2020 adalah 8,6 % ditargetkan menjadi 7,4 % pada tahun 2024. Namun, capaian dari unmet need sendiri menunjukkan trend yang tidak baik dimana tahun 2021 sebesar 18%, tahun 2022 sebesar 14,7%, tahun 2023 sebesar 12,9%. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ini menunjukkan hanya 13 dari 100 PUS yang sedang memakai kontrasepsi modern.

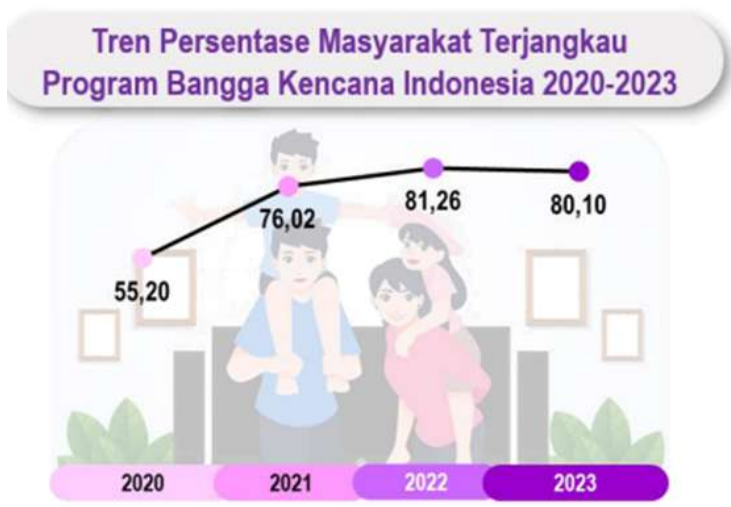


e. Capaian Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DCR) 12 sudah menunjukkan trend yang baik dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2021 sebesar 21%, tahun 2022 sebesar 21,6%, dan tahun 2023 terus menurun ke angka 20,3% yang artinya hanya 20 dari 100 PUS yang menggunakan KB di Indonesia dan mengalami putus pakai KB dalam 12 bulan terakhir.



f. Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) merupakan ukuran program Pembangunan keluarga yang ditunjukan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Capaian IBANGGA menunjukkan peningkatan yang cukup significant dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Ini menunjukkan Upaya penyampaian informasi terkait keluarga berkualitas sampai ke Masyarakat luas. Trend capaian IBangga di tahun 2021 sebesar 54,01 kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar 56,07 dan terus meningkat ke angka 61,43% di tahun 2023 yang menunjukkan ada sebesar 61,43 keluarga di Indonesia yang berada pada kategori keluarga berkembang.

g. Persentase Masyarakat yang terjangkau program bangga kencana adalah keterjangkauan informasi program bangga kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program bangga kencana melalui media atau petugas. Sama dengan indicator IBANGGA yang menunjukan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Ada sekitar 80 dari 100 keluarga di Indonesia yang terjangkau informasi program bangga kencana.



5. Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan BOKB Menu Linlap tahun 2021-2023

Dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP, Ditlilap secara rutin telah melaksanakan Sosialisasi setiap awal tahun sekitar Januari-Februari, kemudian melakukan pertemuan Monitoring dan Evaluasi setiap tri wulanan di bulan April, Juli dan Oktober melalui Pertemuan secara daring dengan mengundang seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Ditlilap juga melakukan fasilitasi pembinaan BOKB langsung ke provinsi yang realisasi masih rendah baik secara langsung ataupun daring (tergantung ketersediaan anggaran) terutama yang menjadi wilayah binaan ADPIN. Dalam melakukan monitoring, Ditlilap juga menggunakan dasar realisasi dari aplikasi Morena.

6. Isu Strategis DAK Fisik dan BOKB Menu Lini Lapangan tahun 2021-2023

Dalam pelaksanaan anggaran DAK Fisik dan BOKB masih ada hambatan-hambatan yang dialami OPD kabupaten/kota untuk merealisasikan anggaran tersebut. Hambatan-hambatan yang sering disampaikan OPD KB kabupaten/kota:

• Anggaran DAK Fisik Menu Linlap:



- (1) Kurangnya informasi di lini lapangan terkait pengadaan kendaraan, Pembangunan balai;



- 2) Status Ketersediaan lahan yang digunakan untuk Pembangunan balai;

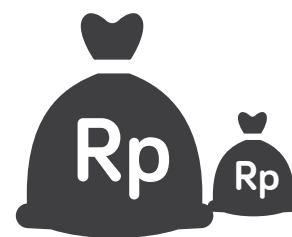


- (3) Kendala dalam proses Pengadaan Kontrak

• Anggaran BOKB Menu Linlap, terdiri dari beberapa sub menu yaitu

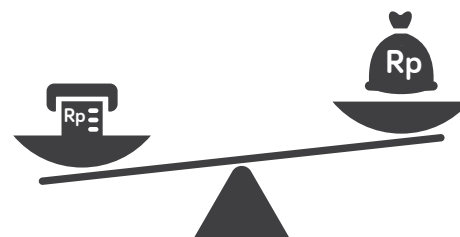
a.) Menu Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan

Adapun yang menjadi isu strategis di dalam menu ini adalah: Keterlambatan Pencairan Dana yang baru bisa terserap rata-rata di TW II; Rotasi SDM yang Tinggi, Perbedaan Regulasi aturan keuangan daerah dan Juknis yang ditetapkan; Adanya Mis-Koordinasi antara Pengelola DAK di OPD KB dengan PKB/PLKB, Ka UPT dan Tim Pengendali DAK Provinsi; Informasi Dana Salur yang masuk ke kas daerah terlambat diketahui daerah



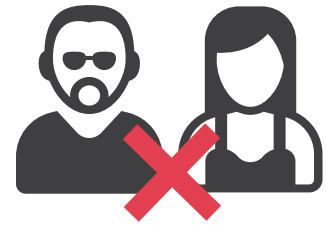
b.) Menu Langgan Daya dan Jasa

Adapun yang menjadi isu strategis di dalam menu ini adalah: Keterlambatan Pencairan Dana; Kebutuhan Operasional Langgan dan Daya Lebih Kecil dari Pada Anggaran yang diberikan



c.) Menu Keamanan dan Pramusaji

- Adapun yang menjadi isu strategis di dalam menu ini adalah: Keterlambatan Pencairan Dana; Unit Cost dibawah UMR sehingga banyak OPD yang tidak merekrut tenaga Keamanan dan Pramusaji.



d.) Menu Operasional Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting dan Operasional Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting

- Adapun yang menjadi isu strategis di dalam menu ini adalah: Keterlambatan Pencairan Dana, prioritas daerah yang berbeda; Pengisian di Aplikasi Elsimil masih mengalami kendala, sehingga perlu back up data secara manual dan menjadi dua kali pekerjaan; Tidak adanya penetapan target pendampingan bagi TPK; Turn Over TPK yang tinggi

e.) Mini lokakarya Kecamatan

- Adapun yang menjadi isu strategis di dalam menu ini adalah: Keterlambatan Pencairan Dana; Kegiatan minlok harus mengikuti jadwal dari OPD KB sehingga terkadang tumpang tindih dengan kegiatan lain di kecamatan yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan optimal; Pemahaman pengelola BOKB Kab/Kota dalam memahami Juknis; Jumlah peserta yang di hadirkan terbatas; Kesulitan dalam menggunakan dana SILPA



f.) Operasional Pelaksanaan KIE

- Adapun yang menjadi isu strategis di dalam menu ini adalah: keterbatasan jumlah peserta dan unit cost yang kecil menyebabkan tidak semua peserta sasaran dapat diundang



E. Kesimpulan

Dari hasil telaah dan evaluasi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Penyerapan anggaran baik DAK Fisik dan BOKB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2021-2023. Namun, target fisik baik balai penyuluhan dan kendaraan antar jemput akseptor belum semua terealisasi. Balai Penyuluhan KB masih kurang 924 balai untuk memenuhi 1 kecamatan 1 balai penyuluhan KB. Jumlah kendaraan antar jemput akseptor juga masih belum memenuhi kebutuhan, misal jumlah kendaraan roda dua baru ada diangka 12.103 sedangkan jumlah penyuluh kb sebanyak 17.464, belum lagi jumlah plkb non asn serta opd kb yang termasuk target pemberian kendaraan roda dua (sesuai juknis). Diharapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, kebutuhan balai dan kendaraan antar jemput akseptor sudah dapat terpenuhi
2. Ketidaktahuan anggaran yang sudah masuk ke KAS Daerah, serta metode pencairan dana salur maupun dana silpa
3. Keterlambatan anggaran masih mendominasi seluruh wilayah yang menyebabkan rendahnya realisasi di beberapa daerah
4. Keberagaman setiap stakeholder dalam memahami juknis DAK Sub Bidang KB
5. Rotasi SDM (turn over) yang masih sangat tinggi

F. Rekomendasi

Adapun yang menjadi rekomendasi dari hasil kajian dan evaluasi, Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Juknis di 3 bulan pertama pelaksanaan
2. Koordinasi stakeholder terkait Pemkot/Kab/Dinas Teknis/DPKAD baik pengusulan DAK Fisik maupun Menu BOKB, ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan
3. Pelatihan TPK yang dilakukan di awal tahun untuk mendukung pengetahuan TPK dalam pendampingan
4. Optimalisasi aplikasi Elsimil

G. Penutup

Demikian laporan telaah dan evaluasi DAK Fisik dan BOKB menu lini lapangan ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengusulan anggaran DAK Fisik dan BOKB di tahun 2025.

Jakarta, 23 Januari 2024

Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan

I Made Yudhistira D, M.Psi



Sumber Foto dan Ilustrasi:

- <https://autoride.co.id/yamaha-lexi-jadi-kendaraan-operasional-petugas-penyuluh-kb-ponorogo/>
- <https://www.republika.id/posts/10075/bkkbn-apresiasi-penyuluh-dalam-melawan-covid-19>
- Aset Ilustrasi Lini Lapangan



DIREKTORAT BINA PENGGERAKAN LINI LAPANGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Jln. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur

BERENCANA ITU KEREN



@BKKBNofficial

Follow:

@rumahbacapkb

RUMAH BACA
P&B PLKB

@rumahbacapkbplkb